

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan peneliti atas beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Norsanti dan Muhammad Afdali pada tahun 2020 dengan judul *Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu dan Desa Masintan)*. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (dalam Agustino, 2017: 145-151) yaitu mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan implementasi Program Keluarga Harapan cukup efektif akan tetapi dalam pengimplementasian PKH di Desa Binturu dan Masintan ini masih ditemui beberapa kendala seperti adanya kesukaran teknis yang dijumpai pendamping PKH terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang PKH disebabkan tingkat pendidikan KPM yang masih rendah serta kondisi ekonomi KPM yang masih rendah dan berada di bawah garis kemiskinan, selain itu terjadi beberapa kali perubahan pada aturan program PKH

sehingga hal ini yang terkadang menyulitkan para pelaksana karena mereka harus menyesuaikan dengan perubahan aturan tersebut. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti tentang Program Keluarga harapan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya ada pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hakim Darajat dan Septa Ekasari pada tahun 2021 dengan judul *Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari riset ini terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya jika ATMnya hilang, maka Dinas Sosial selaku fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) harus membuat surat rekomendasi kehilangan kepada pihak bank, pemahaman Keluarga penerima Manfaat (KPM) terhadap sosialisasi yang sudah dilakukan pendamping maupun koordinator masih sulit dicerna, masih terjadi selisih paham antara stakeholder serta jangkauan desa yang jauh dan medan yang sulit membuat terkendalanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masuk dan pertemuan antar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhambat. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan terletak pada sama-sama meneliti tentang Program Keluarga harapan dengan menggunakan metode

¹ Norsanti dan Muhammad Afdalli, *Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu dan Desa Masintan)*, Vol. 2, No. 1, Al idara Balad, 2020, Hal.1-12.

deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ada pada teori yang digunakan dalam penelitian ini.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tety Thalib pada tahun 2020 dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sistem pendataan Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat yang secara taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan terletak pada sama-sama meneliti tentang Program Keluarga harapan

² Anwar Hakim Darajat dan Septa Ekasari, *Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)*. Vol. 10, No. 1, JURNAL TRANSLITERA, 2021, Hal. 8-14.

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ada pada teori yang digunakan³.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satibi dan Undang Sudrajat pada tahun 2019 dengan judul *Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh dimensi content of policy dan context of policy. Oleh karena itu dibutuhkan dimensi political will dan kelembagaan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan terletak pada sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian yang berbeda.⁴

³ Tety Thalib, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*, : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. VII, No. 1, (2020), Hal.39-48.

⁴ Iwan Satibi dan Undang Sudrajat, *Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya*, JISPO, Vol. 9, No. 2, (2019), Hal. 362-381.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan	Hasil
<p>“Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu dan Desa Masintan)”, Norsanti dan Muhammad Afdalli, 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif. • Membahas tentang Program Keluarga Harapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya. • Teori yang digunakan. 	<p>Program Keluarga Harapan yang dilakukan di Kecamatan kelua cukup efektif, Walaupun dalam pengimplementasian PKH di Desa Binturu dan Masintan ini masih ditemui beberapa kendala seperti adanya kesukaran teknis yang dijumpai pendamping PKH terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang PKH disebabkan tingkat pendidikan KPM yang masih rendah serta kondisi ekonomi KPM yang masih rendah dan berada di bawah garis kemiskinan, selain itu terjadi beberapa kali perubahan pada aturan program PKH sehingga hal ini yang terkadang menyulitkan para pelaksana karena mereka harus menyesuaikan dengan perubahan aturan tersebut</p>

<p>“Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)”, Anwar Hakim Darajat dan Septa Ekasari, 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif. • Membahas tentang Program Keluarga Harapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya. • Teori yang digunakan 	<p>Efektivitas dan implementasi program keluarga harapan (PKH) sudah dapat dikatakan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilihat dari beberapa indikator efektivitas diantaranya ketepatan perhitungan biaya, sasaran, tujuan dan berfikir. Akan tetapi pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap sosialisai yang sudah dilakukan pendamping maupun koordinator masih sulit dicerna, masih terjadi selisih paham antara stakeholder serta jangkauan desa yang jauh dan medan yang sulit membuat terkendalanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).</p>
<p>“Implementasi Program Keluarga HARAPAN (PKH) Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo”,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif. • Membahas tentang Program Keluarga Harapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya. • Teori yang digunakan 	<p>Sistem pendataan Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sesuai dengan syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak</p>

Tety Thalib,
2020



terdata, namun sebaliknya banyak masyarakat yang secara taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan

			Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya”, Iwan Satibi dan Undang Sudrajat, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya. • Menggunakan penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan. 	<p>bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang mengacu pada hasil benchmarking. Hasilnya mencakup dua hal utama, yaitu kebutuhan akan kemauan politik daerah kepala dan pembentukan lembaga khusus yang menangani kemiskinan.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023.

2.1 Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Menurut George Stainer dan Jhon Minner, strategi melibatkan penentuan misi dan sasaran organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Ini melibatkan perumusan kebijakan yang khusus untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya dengan tepat guna mencapai tujuan utama organisasi. Pandangan Stephani K. Marrus, menggambarkan strategi sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh para pemimpin puncak organisasi. Fokusnya adalah mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui penyusunan

cara atau upaya yang efektif untuk mencapainya. Menurut Quinn, strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, dan serangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi yang baik dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelemahan internal perusahaan serta mengantisipasi perubahan dalam lingkungan.⁵

Menurut Chandler, strategi digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Hal ini melibatkan pengaturan program yang berkelanjutan dan prioritas alokasi sumber daya. Sementara itu, Kotten menjelaskan bahwa strategi adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh para pemimpin tingkat atas organisasi. Fokusnya adalah mencapai tujuan jangka panjang organisasi dengan menyusun cara atau upaya yang efektif untuk mencapainya.⁶

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara bertindak untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi berdasarkan pada penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

⁵ Erika Revida et al. Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi (Cirebon: Insania, 2021), Hal. 153-154.

⁶ Evawati Sri Maya Siburian, Strategi Pemerintah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Dalam Pemeliharaan Fasilitas Objek Wisata Kota Parapat Sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7586/EVAWATI%20SRI%20MAYA%20SIBURIAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 16:56.

2.2.2 Syarat-syarat Strategi

Suatu perencanaan agar berjalan dengan sesuai sasaran dan bisa diterapkan secara efektif atau efisien. Maka terdapat syarat penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi menurut Sondang P. Siagian, yaitu:

- 1) Strategi harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dan berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul, dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif, atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
- 2) Strategi harus diperhitungkan secara realistis kemampuannya, suatu organisasi dalam menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoprasionalkan strategi tersebut.
- 3) Strategi yang telah ditentukan diopresionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat atau tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, namun juga mencakup oprasional atau pelaksanaannya.⁷

2.2.3 Manfaat Strategi

Dalam menentukan suatu strategi tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang akan dicapai dimasa mendatang. Setiap strategi dalam organisasi baik pemerintah maupun swasta tentu memiliki manfaat yang sesuai dengan harapan. Manfaat dari penetapan strategi pada organisasi yakni, suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa mendatang dala rangka penetapan

⁷ Siagian, S. P. (2014). Manajemen strategik: strategi untuk menghadapi era globalisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini agar mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar memiliki partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interelasi.

2.2.4 Tahapan-tahapan Strategi

Menurut Blanchard mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Definisi tersebut memandang keterlibatan masyarakat mulai tahapan-tahapan strategi yang dibuat oleh pemerintah seperti :

- 1) Pembuatan keputusan
- 2) Penerapan keputusan
- 3) Penikmatan hasil
- 4) Evaluasi

pengertian pemberdayaan masyarakat seringkali dipahami sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat dalam program yang sering dipahami sebagai bentuk partisipasi, maksudnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Partisipasi dalam konteks ini diartikan sebagai mengikutsertakan masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya,

2.2.5 Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten, tipe-tipe strategi meliputi :⁸

1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2) *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3) *Resource Support Strategy* (Strategi Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

4) *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

⁸ Melda Budiarti, Skripsi: Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus).

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif startegik. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kondisi ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi takaran kehidupan merupakan kemiskinan. Rendahnya suatu pendapatan terhadap individu atau kolektif dalam memenuhi kebutuhan pokok entah berupa sandang, pangan, maupun papan. Serta memiliki dampak pula pada pemenuhan taraf kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Menurut Sholeh, terdapat berbagai definisi mengenai kemiskinan. Salah satu definisi mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primer dan meningkatkan kondisi hidupnya. Definisi lainnya menyoroti kurangnya kesempatan untuk berusaha dan mencapai tujuan hidup. Ada juga definisi yang lebih luas yang melibatkan aspek sosial dan moral dalam pemahaman tentang kemiskinan. Secara sempit, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh cukup uang dan barang-barang yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya.⁹

⁹ Diana Wahyuiati, Skripsi: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam, (Batam: Universitas Putera Batam, 2020), Hal. 15.

Secara umum, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai situasi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka secara finansial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat memastikan keberlanjutan hidup mereka. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan dasar ini mencakup harga-harga umum yang berlaku, sehingga kualitas hidup mereka terpengaruh negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok mengalami ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan kualitas hidup secara umum.

Definisi kemiskinan ini diulas kembali dan juga diperlebar berdasarkan masalah-masalah yang ada dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu menjadi miskin. Menurut Chambers, ia berpendapat jika kemiskinan ialah suatu *integrated concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu:¹⁰

1. Kemiskinan (*proper*) ialah masalah dimana kondisi ketidakmampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan paling mendasar. Konsep atau persepsi ini berlaku bukan hanya kepada kolektif yang tidak memiliki penghasilan, namun berlaku pula pada kolektif yang telah memiliki penghasilan.
2. Ketidakberdayaan (*powerless*) pada umumnya ialah rendahnya kapabilitas penghasilan yang berakibat juga terhadap kekuatan sosial (*social power*) seorang individu ataupun kolektif terutama dalam mendapatkan keadilan

¹⁰ *ibid.*, Hal. 16-17.

atau kesetaraan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) ialah kondisi dimana seorang individu atau kolektif yang dikategorikan miskin jika tidak

memiliki kapabilitas untuk mengatasi situasi diluar dugaan dimana pada situasi tersebut sangat memerlukan suntikan penghasilan untuk menyelesaikannya. Misalkan situasi rawan seperti bencana alam, kita pasti menghadapi keadaan kesehatan yang memerlukan pembiayaan obat yang cukup mahal, dan keadaan-keadaan darurat lainnya yang memerlukan kapabilitas penghasilan yang mampu menutupnya. Kondisi kemiskinan ini dinilai tidak mampu untuk melalui kondisi darurat misalnya seperti bencana alam.

4. Ketergantungan (*dependency*) ialah kondisi dimana seorang individu memiliki batasan kapabilitas penghasilan atau kekuatan sosial yang disebut miskin. Dimana suatu kondisi miskin bisa menyebabkan adanya ketergantungan kepada pihak lain. Mereka menjadi tidak memiliki suatu kecakapan atau kemampuan untuk menciptakan solusi yang menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan terciptanya penghasilan baru. Sehingga pertolongan pihak luar sangat dibutuhkan oleh orang tersebut untuk menghadapi masalah-masalah terutama yang berhubungan dengan kebutuhan atas sumber penghasilan.

5. Keterasingan (*isolation*) merupakan dimensi yang dimaksud oleh Chambers sebagai suatu keadaan dimana individu atau kolektif yang menjadi miskin

akibat faktor lokasi. Hal tersebut terjadi karena masyarakat miskin yang hidup jauh dari pusat perkembangan ekonomi. Sehingga sebagian besar fasilitas kemakmuran sosial banyak yang terfokus di pusat saja atau perkotaan dan kota-kota besar saja. Dengan adanya hal ini tentu menyebabkan masyarakat yang hidup di daerah terpencil atau jauh dari pusat pertumbuhan seperti kotakota besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang ingin merasakan fasilitas kesejahteraan sosial sehingga dengan terjadinya kondisi tersebut bisa menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat yang berada di tempat jauh dari pusat perkembangan.

2.3.2 Bentuk-bentuk dan Jenis-jenis Kemiskinan

Chambers memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai bentuk kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan kondisi yang dianggap sebagai masalah multidimensional, kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk utama:

1. **Kemiskinan absolut:** Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana pendapatan individu atau kelompok berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Garis kemiskinan ini dapat ditentukan sebagai jumlah rata-rata yang dikeluarkan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terkait dengan tingkat kesejahteraan. Konsep kemiskinan absolut ini digunakan secara luas untuk menetapkan atau menggambarkan kriteria individu atau kelompok yang dianggap miskin.

2. Kemiskinan relatif: Kemiskinan relatif disebabkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang tidak merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan ini menghasilkan kesenjangan pendapatan atau kesenjangan tingkat kesejahteraan. Ketika suatu daerah tidak tercakup oleh berbagai program pembangunan ekonomi, terutama di kota-kota besar, daerah tersebut dapat tertinggal dalam hal kemajuan.

3. Kemiskinan kultural: Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh sikap atau kebiasaan masyarakat yang didasarkan pada budaya atau adat istiadat yang enggan untuk berubah melalui metode modern. Kebiasaan ini sering kali mencakup sifat pemalas, pemborosan, kurangnya kreativitas, yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain.

4. Kemiskinan struktural: Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya. Hal ini terjadi karena adanya tatanan sosial-budaya atau politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan struktural sering kali memiliki unsur diskriminatif. Kemiskinan struktural mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam bidang ilmu sosial, terutama dari lembaga pemberi bantuan atau pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Kemiskinan struktural dianggap sebagai bentuk kemiskinan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya kemiskinan dalam bentuk lainnya.

Adapun beberapa jenis kemiskinan yang berdasarkan pada sifatnya ialah sebagai berikut:

1. Kemiskinan alamiah: Kemiskinan alamiah terjadi karena keterbatasan sumber daya alam dan kurangnya sarana dan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air bersih, serta kekurangan kesuburan tanah. Daerah-daerah yang cenderung mengalami kemiskinan alamiah sering kali merupakan wilayah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan dan tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.

2. Kemiskinan buatan: Kemiskinan buatan terjadi akibat ketidakmerataan sistem modernisasi atau pembangunan yang mengakibatkan masyarakat di daerah tertinggal atau terpencil tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, sarana, dan prasarana ekonomi. Kemiskinan buatan adalah hasil dari dampak negatif dari implementasi konsep pembangunan yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang. Negara-negara ini memiliki target yang tinggi untuk mencapai perkembangan ekonomi, tetapi hasil pembangunan yang dihasilkan tidak merata, sehingga mereka yang bekerja di sektor pertanian atau sektor lainnya tidak mendapatkan manfaat yang setara. Kemiskinan buatan masih terkait dengan konsep pembangunan yang telah dilakukan oleh berbagai negara berkembang pada tahun 1970-an dan 1980-an.

kedua jenis kemiskinan tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah dan faktor-faktor buatan manusia. Faktor alamiah, seperti keterbatasan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dapat membuat suatu daerah atau kelompok masyarakat mengalami kemiskinan secara alami. Sementara itu, faktor buatan manusia, seperti kebijakan

pembangunan yang tidak merata, kurangnya akses terhadap sumber daya, atau ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi, juga dapat menyebabkan kemiskinan. Penting untuk memahami bahwa kemiskinan bukan hanya hasil dari kondisi alamiah semata, tetapi juga merupakan konsekuensi dari tindakan manusia dan kebijakan yang tidak memperhatikan keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, memperluas akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, serta melibatkan semua pihak dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.3 Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan

Menurut Chambers, skema terciptanya kemiskinan melibatkan rendahnya kapabilitas penghasil individu atau kolektif dalam mencukupi kebutuhan primer seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Rendahnya kapabilitas penghasil ini berdampak pada daya beli yang rendah atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada gilirannya menghasilkan kondisi ketidakmampuan mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan. Beberapa contoh dampak rendahnya kapabilitas penghasil tersebut antara lain:

1. Tidak tersedianya pangan yang layak dengan takaran gizi yang diperlukan, yang menyebabkan risiko malnutrisi atau kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini dapat membuat individu atau kelompok masyarakat rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk.
2. Tidak terjaminnya akses kesehatan yang memadai, menyebabkan rentan terhadap penyakit menular dan keterbatasan dalam mendapatkan

pengobatan yang diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit yang dapat diatasi.

3. Keterbatasan dalam memiliki perumahan yang layak, karena terbatasnya penghasilan yang dapat dialokasikan untuk memperoleh hunian yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Kondisi perumahan yang tidak layak dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan individu atau keluarga.
4. Rendahnya taraf pendidikan yang dapat diakses, yang disebabkan oleh keterbatasan penghasilan. Individu atau kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Semua faktor ini saling terkait dan berkontribusi terhadap terciptanya kemiskinan, dan hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Kondisi-kondisi diatas ialah akibat terbatasnya atau rendahnya penghasilan yang menjadi sebab terwujudnya keadaan kesehatan masyarakat yang dikategorikan rendah (morbiditas) atau ada dalam keadaan rendah gizi. Keadaan seperti ini sangat rawan pada serangan penyakit dan kekuarangan gizi yang akan diikuti tingat kematian yang tinggi (mortalitas).

Tingginya angka mortalitas dan rendahnya kesehatan masyarakat dapat berdampak pada beberapa kondisi yang mempengaruhi keikutsertaan sosial, kehadiran, kecerdasan, dan keterampilan individu. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kondisi tersebut:

1. Rendahnya keikutsertaan sosial: Kondisi kesehatan yang buruk atau rendahnya kesehatan masyarakat dapat menghambat partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Ketika seseorang menderita penyakit serius atau memiliki keterbatasan fisik yang signifikan, mereka mungkin merasa terbatas dalam berinteraksi dengan masyarakat atau terlibat dalam kegiatan sosial. Ini dapat menyebabkan rendahnya keikutsertaan sosial dan keterbatasan dalam membangun hubungan sosial yang bermanfaat.
2. Tingginya ketidakhadiran: Kesehatan yang buruk atau tingginya tingkat morbiditas dapat menyebabkan ketidakhadiran yang meningkat dalam berbagai aktivitas. Seseorang yang sering sakit atau memiliki kondisi kesehatan yang serius mungkin perlu sering absen dari sekolah, pekerjaan, atau kegiatan sosial lainnya. Ketidakhadiran yang terus-menerus dapat mengganggu kemajuan individu dalam berbagai aspek kehidupan dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan yang penting.
3. Rendahnya kecerdasan: Kondisi kesehatan yang buruk atau kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dapat berdampak pada rendahnya tingkat kecerdasan individu. Kesehatan yang baik dan nutrisi yang memadai penting untuk perkembangan otak yang optimal. Kurangnya gizi atau kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi fungsi kognitif, kemampuan belajar, dan kemampuan intelektual seseorang. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan dan keterbatasan dalam pemahaman, analisis, dan kreativitas.

4. Keterampilan yang rendah: Kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Ketika individu menghadapi masalah kesehatan yang kronis atau memiliki keterbatasan fisik, mereka mungkin kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu atau mengembangkan keterampilan khusus. Keterbatasan ini dapat menghambat potensi individu dalam mencapai kemandirian ekonomi dan mempengaruhi peluang kerja yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor kesehatan yang saling terkait dengan keikutsertaan sosial, kehadiran, kecerdasan, dan keterampilan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau, memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, dan menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu dapat membantu mengurangi dampak negatif dari tingginya angka mortalitas dan morbiditas pada masyarakat yang rentan.¹¹

2.3.4 Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

Secara umum ada beberapa faktor dalam memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka waktu yang lama untuk menyediakan barang dan jasa bagi

¹¹ Ibid., Hal. 21-23.

penduduknya, melalui peningkatan teknologi, institusi, dan ideologi sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada. Ada empat faktor yang dianggap penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik dan neoklasik, yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas tanah dan sumber daya alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika intensitas aktivitas ekonomi meningkat. Menurut Schumpeter, inovasi adalah aspek utama yang mendorong perkembangan ekonomi, dengan peran penting dari inovator atau wiraswasta. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari peningkatan output per kapita dalam jangka waktu yang lama, seperti yang dijelaskan oleh Boediono.

Terdapat tiga aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Todaro, yaitu:

- a. Akumulasi modal: Investasi dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM). Akumulasi modal terjadi ketika sebagian pendapatan saat ini disimpan dan diinvestasikan untuk menghasilkan output yang lebih besar di masa depan.
- b. Pertumbuhan penduduk angkatan kerja: Pertambahan jumlah penduduk yang berarti peningkatan tenaga kerja yang dapat menghasilkan lebih banyak, serta meningkatkan potensi pasar domestik.

- c. Kemajuan teknologi: Perbaikan metode-metode tradisional melalui kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terjadi ketika metode yang digunakan dalam pekerjaan tradisional diperbarui.

Terdapat tiga klasifikasi kemajuan teknologi yang dianggap maju, yaitu:

- a. Kemajuan teknologi yang tidak memihak: Output yang lebih tinggi dicapai dengan kuantitas input yang tetap.
- b. Kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja atau modal: Output yang lebih tinggi dicapai dengan penggunaan tenaga kerja atau modal yang lebih efisien.
- c. Kemajuan teknologi dalam hal peningkatan modal: Peningkatan penggunaan modal yang produktif.

Semua faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan akumulasi modal yang cukup, pertumbuhan penduduk yang seimbang, dan kemajuan teknologi yang terus-menerus.

2. Pendidikan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan adalah upaya yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran sehingga peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti kemampuan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kepribadian individu, keterampilan, sikap baik, dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Tujuan

pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, mengamalkan ilmu, responsif, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pendidikan formal: Merupakan jenjang pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan, terdiri dari: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan Menengah, sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar, terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan bentuk lain yang setara. Pendidikan Tinggi, sebagai kelanjutan pendidikan setelah SMA, meliputi program pendidikan Diploma, Sarjana, dan lainnya.
- b. Pendidikan nonformal: Merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal atau tingkat pendidikan umum yang dapat diikuti secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai pengganti, tambahan, atau pelengkap pendidikan formal.
- c. Pendidikan informal: Merupakan jalur pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekitar dan keluarga, berupa kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal dapat dianggap setara dengan pendidikan formal atau nonformal setelah peserta didik lulus ujian berstandar nasional, seperti dalam sekolah formal pada umumnya.

3. Pengangguran

Pengangguran ialah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan yang ingin memperoleh kerja tapi masih belum dapat mendapatkannya.¹² Permasalahan pengangguran ini juga yang mengakibatkan tingkat pemasukan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat sampai pada potensi puncak yaitu salah satu masalahnya ialah permasalahan utama makro ekonomi yang paling pokok.

1) Jenis-jenis pengangguran

Pengangguran bisa ditafsirkan juga sebagai usia kerja yang belum memiliki pekerjaan atau tidak bekerja secara optimal. Pengangguran ini dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran terselubung (Disguised Unemployment) yang terjadi ketika seseorang tidak bekerja secara optimal karena adanya faktor tertentu.
- b. Menganggur/pengangguran (Under Unemployment) yang terjadi ketika seseorang tidak dapat bekerja secara optimal karena kurangnya lapangan kerja, biasanya bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
- c. Pengangguran terbuka (Open Unemployment) yang terjadi ketika seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jenis pengangguran ini cukup umum karena meskipun telah berusaha maksimal untuk mendapatkan pekerjaan, mereka belum berhasil mendapatkannya.

2) Macam-macam pengangguran

Berdasarkan penyebab terjadinya seorang individu bisa menganggur, pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

¹² Lora Eka Nainggolan et al. *Ekonomi Makro*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal. 8.

- a. Pengangguran konjungtural atau (*Cycle Unemployment*) dikenal sebagai pengangguran siklus, terjadi karena fluktuasi dalam gelombang ekonomi, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam siklus ekonomi.
- b. Pengangguran struktural atau (*struktural unemployment*) terjadi ketika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi dan pola ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran struktural meliputi penurunan permintaan, kemajuan teknologi yang mempengaruhi lapangan kerja, dan keputusan pemerintah.
- c. Pengangguran friksional atau (*Frictional Unemployment*) dikenal sebagai pengangguran sukarela, terjadi karena ketidakselarasan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan informasi, proses mencari pekerjaan yang memakan waktu, atau perubahan pekerjaan secara sukarela.
- d. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musiman dalam kegiatan ekonomi, seperti perubahan antara musim tanam dan musim panen. Contohnya, petani yang menanam tanaman musiman akan mengalami pengangguran saat musim tanam berakhir.
- e. Pengangguran teknologi terjadi ketika manusia digantikan oleh mesin atau teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga menyebabkan pengangguran pada tenaga kerja manusia.

- f. Pengangguran siklus terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi selama siklus ekonomi, terutama saat terjadi resesi. Pengangguran siklus disebabkan oleh penurunan permintaan agregat di masyarakat.¹³

Indikator yang umum digunakan oleh BPS untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT). Menurut Tambunan, TPT dapat memiliki berbagai dampak terhadap tingkat kemiskinan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika rumah tangga memiliki keterbatasan likuiditas, artinya konsumsi hari ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka pengangguran dapat langsung berdampak pada tingkat kemiskinan, yang tercermin dalam tingkat kemiskinan konsumsi.
- 2) Jika rumah tangga tidak terbatas oleh keterbatasan likuiditas, yang berarti konsumsi hari ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, meningkatnya pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka waktu yang lebih lama, tetapi tidak akan berdampak dalam jangka pendek. Pertumbuhan populasi tenaga kerja yang cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat akan menyebabkan masalah pengangguran terus meningkat.

4. Kependudukan

Penduduk memiliki peran yang sangat krusial didalam pembangunan pada suatu area. Maka dari itu perlu atensi bukan hanya pada sisi jumlah penduduk

¹³ Agus Yulistiyono et al. Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), Hal. 55.

melainkan juga pada kualitas penduduk. Penduduk yang memiliki kualitas ialah modal yang besar bagi pembangunan yang bisa diekspektasikan untuk mengatasi berbagai dampak adanya dinamika penduduk.

Pertambahan penduduk yang tinggi akan memberikan pengaruh pada taraf padatnya penduduk yang ada di area tersebut. Padatnya penduduk ini juga dinyatakan dengan jumlah orang dalam satuan luas lahan (per km², per mil) di suatu area.

Laju pertumbuhan penduduk biasanya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Dengan begitu, jumlah usia kerja secara otomatis akan memikul tanggungan yang lebih berat untuk menafkahi anak-anak yang masih berusia dibawah 14 tahun. Penduduk yang sudah lanjut usia atau yang masih anak-anak secara ekonomis dikategorikan sebagai beban ketergantungan yang berarti mereka ialah bagian masyarakat yang tidak menghasilkan, sehingga hal tersebut menjelma beban usia kerja yang menghasilkan. Laju bertambah ataupun menurunnya penduduk tidaklah cukup mendeskripsikan keadaan kemiskinan yang sesungguhnya ada dalam suatu wilayah. Dalam korelasinya dengan taraf kemiskinan, selain jumlah penduduk harus diperhatikan pula variabel yang lain, misalnya kemakmuran masyarakat di area itu sendiri yaitu pada taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat tersedianya lapangan pekerjaan, serta laju perkembangan ekonomi. Sehingga jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan dalam perkembangan manusia seyogyanya mampu untuk mengurangi taraf kemiskinan di wilayah itu.

5. Kesehatan

Pembangunan di sektor kesehatan adalah upaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak, karena kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pembangunan kesehatan juga dianggap sebagai investasi yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memiliki peran yang krusial dalam mengurangi kemiskinan.

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam pembangunan kesehatan termasuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan gratis, fokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti polio dan flu burung, meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar yang terjangkau, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga medis, peningkatan mutu, keamanan, dan efektivitas obat dan makanan, penanganan kesehatan di daerah bencana, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan.

Salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan bertahan hidup jangka panjang adalah harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth/e0). Data ini dihitung melalui paket program mortpack yang menggunakan data rata-rata jumlah anak lahir dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup menurut umur ibu 15-49 tahun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) dan sensus penduduk. Angka kematian bayi dan angka harapan hidup juga digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kesehatan penduduk. Jika angka harapan hidup tinggi di suatu daerah, hal ini mengindikasikan perkembangan sosial-ekonomi yang maju, terutama dalam hal fasilitas kesehatan. Kemajuan dalam

bidang kesehatan menunjukkan adanya peningkatan taraf kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

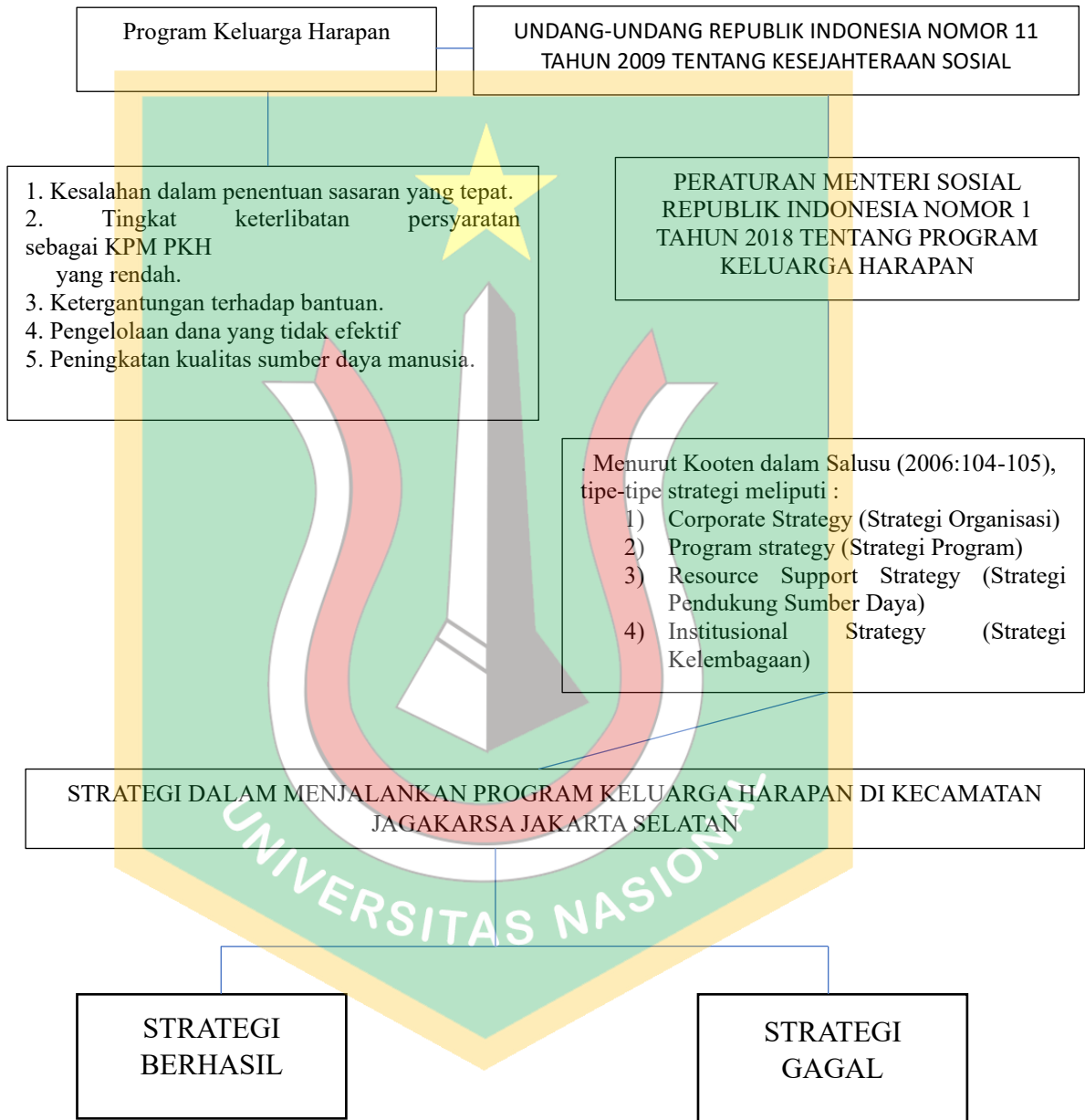
Teori lingkaran kemiskinan yang diungkapkan oleh Myrdal menyatakan bahwa semakin tinggi taraf kesehatan masyarakat, angka harapan hidup juga akan meningkat, begitu pula dengan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Dengan demikian, semakin tinggi angka harapan hidup, tingkat kemiskinan cenderung menurun.¹⁴



¹⁴ Ibid., Hal. 23-32.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh peneliti,2023.